

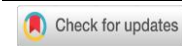


TATA KELOLA PENDIDIKAN ISLAM YANG TRANSPARAN DAN ADIL: ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI AICC VICTORIA

Annisa Sandy Hudha¹, Safira Mufida 'Azmi²

^{1,2}UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: annisasandy424@gmail.com



DOI: <https://doi.org/10.34125/jmp.v11i3.1281>

Sections Info

Article history:

Submitted: 11 April 2026

Final Revised: 23 April 2026

Accepted: 16 May 2026

Published: 24 June 2026

Keywords:

Enrolment Policy

Tuition Fees

Transparency

Accountability

Islamic Education Management

AICC Victoria.



ABSTRACT

Objective: This study aims to analyze how enrolment and tuition fee policies are implemented at the Australian Islamic Centre College (AICC) in Victoria. The research uses a qualitative method with a library-based approach by examining various official documents, institutional policies, and academic sources related to enrolment agreements, admission policies, and enrolment regulations. The findings show that AICC upholds the principles of transparency and accountability by providing clear information, open enrolment agreements, and a structured monitoring system to protect students' rights. However, the institution's financial system still faces challenges, particularly for students from low-income families. Therefore, a more equitable funding model is needed, such as scholarship programs and community support. Overall, AICC's policy reflects a professional and transparent model of Islamic educational management that seeks to maintain a balance between institutional growth and social justice.

ABSTRAK

Objektif: Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana kebijakan mengenai pendaftaran dan biaya pendidikan diterapkan di Australian Islamic Centre College (AICC) di Victoria. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan, yaitu dengan menganalisis berbagai dokumen resmi, kebijakan institusi, serta sumber-sumber akademik yang terkait dengan proses perjanjian pendaftaran, kebijakan pendaftaran, serta ketentuan pendaftaran. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa AICC mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan menyediakan informasi yang jelas, perjanjian pendaftaran yang terbuka, serta sistem pengawasan yang teratur agar hak peserta didik terlindungi. Namun, sistem keuangan lembaga tersebut masih menghadapi kendala terutama bagi peserta didik yang berasal dari keluarga dengan pendapatan rendah. Oleh karena itu, dibutuhkan model pendanaan yang lebih adil seperti pemberian beasiswa dan bantuan dari komunitas. Secara keseluruhan, kebijakan yang diterapkan AICC mencerminkan pengelolaan pendidikan Islam yang profesional, transparan, serta berusaha menjaga keseimbangan antara pertumbuhan lembaga dan keadilan sosial.

Kata Kunci: kebijakan pendaftaran, biaya pendidikan, transparansi, akuntabilitas, manajemen pendidikan Islam, AICC Victoria

PENDAHULUAN

Kebijakan pendaftaran dan biaya pendidikan sangat penting dalam mengelola lembaga pendidikan, baik di tingkat dasar, menengah, maupun perguruan tinggi. Kedua hal ini tidak hanya mengatur prosedur penerimaan siswa, tetapi juga berfungsi sebagai dasar hukum untuk memastikan transparansi, keadilan, dan tanggung jawab antara sekolah dan siswa. Dengan adanya perjanjian pendaftaran dan aturan biaya yang jelas, lembaga pendidikan berusaha membangun hubungan yang sehat dan saling memahami antara sekolah dan siswa (Taylor et al., 2022; Shaleh et al., 2021; Karim et al., 2023).

Di berbagai negara, termasuk Australia, sistem pendaftaran dan biaya pendidikan terus berkembang karena meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk akses pendidikan yang adil dan berkualitas. Menurut Taylor dan timnya, kebijakan yang berorientasi pada keadilan sosial seharusnya menjadi dasar bagi semua proses penerimaan dan pembiayaan siswa (Nathie, 2021). Tanpa kebijakan seperti ini, perbedaan antar daerah dan kelompok ekonomi akan semakin membesar, seperti yang masih terjadi di sistem Pendidikan Australia (Shakeel, 2018). Salah satu contoh lembaga pendidikan yang menerapkan prinsip kebukaan dan keadilan dalam kebijakannya adalah Australian Islamic Centre College (AICC) di Victoria.

Sekolah Islam ini berusaha menjaga keseimbangan antara nilai-nilai keagamaan dan sistem pendidikan nasional Australia. Menurut penelitian (RAHARJO et al., 2024), sebagian besar pendanaan AICC berasal dari hibah pemerintah, lebih dari 80%. Dukungan ini memungkinkan lembaga tersebut tetap menyediakan layanan pendidikan berkualitas tanpa mengenakan beban berlebihan kepada orang tua. Transparansi dalam sistem pelaporan keuangan juga menunjukkan bagaimana lembaga ini menjunjung tinggi tanggung jawab dan akuntabilitas kepada publik (Karim et al., 2023).

Prinsip serupa juga diungkapkan oleh (Asnawan, 2020), yang menekankan bahwa kebijakan pendidikan tidak hanya berupa aturan administratif, tetapi juga harus mencerminkan nilai moral dan tanggung jawab sosial dari lembaga pendidikan. Di AICC, hal ini terlihat dari upaya sekolah memastikan semua siswa mendapatkan hak yang sama tanpa membedakan latar belakang ekonomi atau sosial. Dari berbagai penelitian tersebut, AICC Victoria dapat dianggap sebagai contoh nyata penerapan prinsip transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam kebijakan pendaftaran dan biaya Pendidikan global (Qosyim & Zarkasyi, 2024; Muhtadin, 2025).

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memahami bagaimana kebijakan tersebut diterapkan di AICC serta bagaimana prinsip-prinsipnya dapat menjadi contoh bagi lembaga pendidikan Islam lainnya dalam konteks global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Semua data yang digunakan diperoleh dari buku, jurnal, dan hasil penelitian yang membahas tentang kebijakan pendaftaran dan biaya pendidikan, termasuk perjanjian pendaftaran, kebijakan pendaftaran, serta syarat dan ketentuannya. Proses penelitian dilakukan dengan cara, menganalisis, serta membandingkan isi dari sumber yang relevan. Hasil dari analisis ini digunakan sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan mengenai bentuk kebijakan yang diterapkan, alasan kebijakan tersebut diperlukan, serta cara pelaksanaannya di lembaga pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil dan Perjanjian Pendaftaran, Kebijakan Pendaftaran, Syarat Ketentuan Pendaftaran AICC Victoria

Profil AICC Victoria

Australian Islamic Centre College (AICC) Victoria adalah sebuah lembaga pendidikan Islam yang beroperasi di bawah sistem pendidikan Australia. AICC mampu menyatukan nilai-nilai Islam dengan sistem pendidikan nasional yang menekankan keunggulan, keterbukaan, dan keadilan. Lembaga ini menjadi contoh bagaimana pendidikan Islam bisa berjalan sejalan dengan kurikulum nasional tanpa kehilangan nilai spiritualnya (Gunawan et al., 2024). Di AICC, kurikulum tidak hanya fokus pada nilai akademik, tetapi juga melatih karakter dan mengembangkan potensi siswa. Hal ini sesuai dengan pandangan bahwa pendidikan Islam harus mampu menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, membentuk moral, dan meningkatkan spiritualitas siswa (Thufail, 2020).

Perjanjian Pendaftaran (Enrolment Agreement)

Perjanjian pendaftaran di AICC Victoria dibuat sebagai panduan yang mengatur hubungan antara sekolah dengan siswa dan orang tua. Di dalamnya dijelaskan dengan jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk mengenai biaya pendidikan, jadwal pembayaran, serta cara mengundurkan diri. Semua informasi disampaikan secara terbuka agar tidak terjadi kesalahpahaman antara sekolah dan orang tua. Keterbukaan ini menunjukkan bahwa AICC benar-benar berkomitmen untuk menjaga kepercayaan dan tanggung jawabnya kepada masyarakat.

Dengan cara ini, sekolah tidak hanya membangun hubungan yang transparan, tetapi juga memperkuat rasa percaya antara pihak sekolah dan orang tua dalam mendukung pendidikan anak-anak mereka. Selain itu, AICC juga menerapkan nilai-nilai keislaman seperti kejujuran, amanah, dan tanggung jawab dalam setiap kebijakan yang diterapkan, sehingga seluruh proses pendidikan berjalan dengan adil, terbuka, dan berlandaskan etika Islam (Gunawan et al., 2024).

Kebijakan Pendaftaran (Enrolment Policy)

Kebijakan pendaftaran di AICC Victoria dijalankan dengan prinsip keadilan dan kesempatan yang sama untuk semua calon siswa. Proses penerimaan dilakukan secara terbuka, tanpa memperhatikan latar belakang ekonomi, etnis, atau status sosial seseorang. Semua aturan dibuat sesuai dengan ketentuan pendidikan di negara bagian Victoria yang menekankan pentingnya keterbukaan dan tanggung jawab sosial. Kebijakan ini menunjukkan bagaimana AICC mampu menggabungkan nilai-nilai Islam dengan sistem pendidikan modern secara profesional.

Nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, dan saling menghargai menjadi dasar dalam setiap keputusan dan langkah yang diambil oleh sekolah. AICC juga berusaha menciptakan suasana belajar yang adil dan inklusif, di mana setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai dengan kemampuan dan potensi masing-masing, tanpa merasa diasingkan atau diperlakukan berbeda dalam bentuk apa pun (Gunawan et al., 2024).

Syarat dan Ketentuan Pendaftaran (Terms and Conditions of Enrolment)

Syarat dan ketentuan untuk mendaftar di AICC Victoria mencakup berbagai hal terkait administrasi, keuangan, serta aturan yang harus dipenuhi oleh calon siswa dan orang tua. Semua informasi mengenai biaya, hak, serta kewajiban telah dijelaskan secara jelas agar tidak terjadi salah paham. AICC juga memiliki cara untuk mengembalikan dana serta sistem

pengawasan internal agar semua proses berjalan sesuai dengan peraturan pemerintah. Keterbukaan ini menunjukkan tanggung jawab AICC dalam melindungi hak siswa sekaligus menunjukkan prinsip keadilan dalam pendidikan.

Selain itu, kebijakan yang diterapkan juga mencerminkan komitmen sekolah dalam membangun sistem yang jujur, transparan, dan bisa diandalkan. Dengan cara ini, AICC tidak hanya menjalankan aturan secara profesional, tetapi juga menanamkan nilai-nilai Islam seperti amanah dan tanggung jawab dalam setiap keputusan yang diambil (Thufail, 2020).

B. Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas

Bentuk keterbukaan informasi dalam perjanjian pendaftaran.

Keterbukaan informasi di Australian Islamic Centre College (AICC) Victoria bisa dilihat dari cara lembaga ini memberikan seluruh kebijakan pendaftaran dan biaya pendidikan secara jujur, rinci, dan mudah dipahami. Semua informasi mengenai hak, kewajiban, dan ketentuan biaya diberikan kepada calon siswa dan orang tua melalui dokumen resmi serta media daring yang mudah diakses (Maulida Nuzula Firdaus, 2023). Langkah ini menunjukkan tanggung jawab lembaga dalam membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan karena kurangnya informasi. Dalam perjanjian pendaftaran yang digunakan, AICC telah menulis dengan jelas isi perjanjian yang mencakup hak peserta didik, tanggung jawab lembaga, serta cara pembayaran dan pembatalan pendaftaran. Informasi disampaikan dengan bahasa sederhana tetapi tegas agar orang tua dan siswa memahami setiap ketentuan. Keterbukaan ini mencerminkan penerapan etika profesional yang menghargai nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas dalam lembaga pendidikan (Liana Oly Kisanto et al., 2025).

Dengan cara ini, AICC tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga membangun budaya transparansi yang menjadi dasar hubungan yang baik antara lembaga dan masyarakat. Sistem pendidikan di Australia mengutamakan prinsip akuntabilitas sebagai dasar penting dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Setiap kebijakan dan peraturan yang dibuat harus melewati proses pengawasan dan evaluasi agar sesuai dengan hukum serta prinsip keadilan sosial (Rahadiyan & Mentari, 2021). Di AICC Victoria, pengawasan internal dilakukan secara rutin untuk memastikan semua kebijakan pendaftaran dan biaya berjalan sesuai aturan. Hasil evaluasi juga diberikan secara terbuka kepada pihak berwenang sebagai bentuk tanggung jawab publik. Dengan menerapkan sistem ini, AICC Victoria menjadi contoh lembaga pendidikan Islam yang mampu menyeimbangkan nilai-nilai spiritual dan profesionalisme. Nilai kejujuran dan keadilan diterapkan secara nyata melalui keterbukaan informasi, sedangkan akuntabilitas menjadi bukti komitmen lembaga terhadap pengelolaan pendidikan yang bersih dan dapat dipercaya.

Mekanisme pengawasan dan perlindungan hak siswa

Mekanisme pengawasan dan perlindungan hak siswa dalam Enrolment Agreement dan Terms and Conditions adalah bukti nyata dari akuntabilitas lembaga pendidikan. Dokumen-dokumen ini tidak hanya menjadi syarat administratif semata, tetapi juga berfungsi sebagai alat perlindungan. Tujuan ini sesuai dengan prinsip etika profesi secara umum, yakni untuk melindungi kepentingan publik. Dalam konteks pendaftaran, kepentingan publik ini meliputi hak-hak peserta didik dan keluarganya. Salah satu bentuk perlindungan hak siswa yang paling penting adalah jaminan kerahasiaan data. Kebijakan pendaftaran yang ditemukan dalam penelitian ini menjelaskan secara rinci tentang cara pengelolaan informasi pribadi siswa. Ini mencerminkan prinsip kerahasiaan secara langsung.

Seperti seorang akuntan profesional tidak boleh menggunakan informasi rahasia untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga, lembaga pendidikan melalui kebijakannya juga mengikat diri secara etis untuk tidak menyalahgunakan data siswa. Hal ini merupakan fondasi etis yang mendasari perlindungan privasi (Panjaitan, 2025).

Selain itu, mekanisme pengawasan dalam kebijakan pendaftaran dirancang melalui prosedur penanganan keluhan. Struktur ini dapat dibandingkan dengan kerangka kerja konseptual yang digunakan dalam etika profesi. Kerangka kerja ini dibuat untuk mengidentifikasi dan mengatasi ancaman. Dalam konteks ini, keluhan atau ketidakpuasan siswa dianggap sebagai ancaman terhadap hubungan profesional. Prosedur penanganan keluhan yang jelas bertindak sebagai pengamanan, yang memastikan proses adil dalam menyelesaikan masalah. Hal ini menjadi bentuk akuntabilitas dalam praktik, di mana lembaga tidak hanya menetapkan aturan, tetapi juga menyediakan jalur untuk menantang penerapan aturan tersebut (Hayati et al., 2025).

Perlindungan hak siswa juga dipertahankan melalui penerapan kebijakan yang adil, yang didasarkan pada prinsip objektivitas. Terms and Conditions menjamin bahwa keputusan terkait siswa, seperti sanksi, evaluasi, atau layanan dukungan, tidak dipengaruhi oleh bias atau benturan kepentingan. Prinsip objektivitas ini memastikan perlakuan yang setara dan melindungi siswa dari keputusan yang tidak adil. Mekanisme pengawasan dan perlindungan ini, mulai dari jaminan kerahasiaan data hingga prosedur penanganan keluhan, berfungsi sebagai bukti akuntabilitas. Seperti dalam profesi lainnya, pelanggaran terhadap komitmen yang tertulis bisa menjadi dasar untuk investigasi atau sanksi. Dengan demikian, dokumen pendaftaran tidak hanya melindungi siswa secara pasif, tetapi juga memberdayakan mereka dengan menyediakan mekanisme pengawasan yang jelas dan terstruktur.

C. Keadilan dalam kebijakan biaya Pendidikan

Sistem pembiayaan dan dampaknya terhadap siswa kurang mampu

Kebijakan pendaftaran dan biaya pendidikan di Australian Islamic Centre College (AICC) Victoria mencerminkan sistem pendanaan yang dibuat untuk menjaga kualitas pendidikan dan memastikan lembaga bisa terus berjalan. Namun, dalam penerapannya, kebijakan ini mempunyai dampak yang berbeda bagi siswa yang memiliki keadaan ekonomi berbeda. Bagi siswa yang berasal dari keluarga berpenghasilan tinggi, struktur biaya tidak menjadi hambatan besar, bahkan sering dirasa wajar karena sesuai dengan kualitas pendidikan yang diberikan. Sebaliknya, bagi siswa yang berasal dari keluarga ekonomi terbatas, biaya pendaftaran dan biaya tahunan bisa menjadi beban yang cukup berat. Meskipun lembaga telah menetapkan kebijakan diskon dan sistem pembayaran bertahap, tidak semua keluarga mampu memanfaatkannya dengan baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pendanaan belum sepenuhnya mampu memberikan keadilan kepada seluruh siswa (Annisa Darma Yanti et al., 2024).

Meskipun sekolah sudah menerapkan transparansi dalam menetapkan besarnya biaya, transparansi tidak selalu berarti biaya tersebut bisa dijangkau oleh semua kalangan. Kondisi ini bisa membuat ada perbedaan akses, di mana siswa dari keluarga berpenghasilan tinggi bisa dengan mudah melanjutkan pendidikan, sedangkan siswa dari keluarga yang ekonominya terbatas harus bekerja ekstra agar tetap bisa berkembang. Dampak sosial dari kebijakan ini juga dapat dilihat dari perasaan tidak percaya diri dan partisipasi yang terbatas dari siswa ekonomi kurang mampu dalam berbagai kegiatan sekolah. Biaya tambahan untuk kegiatan ekstrakurikuler, seragam, atau bahan belajar tertentu bisa membuat mereka merasa

berbeda dengan teman-temannya. Akibatnya, potensi akademik dan non-akademik mereka tidak berkembang secara optimal (Annisa, 2022).

Dari sisi sekolah, kebijakan pendanaan memang penting agar sekolah bisa berjalan lancar. Namun, keadilan dalam pendidikan tidak cukup hanya dengan menyediakan akses masuk ke sekolah, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang tanpa hambatan ekonomi. Oleh karena itu, sistem pendanaan perlu lebih diarahkan pada siswa yang ekonominya kurang mampu, seperti melalui program beasiswa, dana sosial dari masyarakat, atau bentuk subsidi silang antar siswa. Penerapan kebijakan seperti ini akan membantu sekolah mencapai tujuan pendidikan Islam, yaitu memberikan kesempatan yang adil bagi semua anak untuk mendapatkan ilmu dan membentuk masa depan yang lebih baik (Winarsih, 2016).

Selain itu, dukungan dari masyarakat dan orang tua juga sangat penting, seperti bentuk donasi, infaq pendidikan, atau kerja sama dengan lembaga sosial, agar bisa memperluas sumber dana bantuan bagi siswa yang membutuhkan. Dengan pendekatan seperti ini, AICC Victoria bisa menciptakan keseimbangan antara keberlanjutan lembaga dan keadilan sosial. Kebijakan pendanaan yang diperhatikan kondisi ekonomi siswa akan memperkuat citra sekolah sebagai lembaga pendidikan Islam yang tidak hanya menekankan kualitas akademik, tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan dan kebersamaan.

KESIMPULAN

Kebijakan pendaftaran dan biaya pendidikan di Australian Islamic Centre College (AICC) Victoria menunjukkan bagaimana sebuah lembaga pendidikan Islam bisa dikelola secara profesional, terbuka, dan adil. AICC mampu menggabungkan nilai-nilai Islam dengan sistem pendidikan di Australia dengan menerapkan kebijakan yang menekankan tanggung jawab serta kualitas dalam layanan pendidikan. Dalam penerapannya, AICC tidak hanya menganggap perjanjian pendaftaran dan ketentuan biaya sebagai aturan administratif biasa, tetapi juga sebagai bentuk komitmen moral untuk melindungi hak siswa dan menjaga tanggung jawab lembaga tersebut. Prinsip transparansi terlihat dari penyampaian informasi yang jelas mengenai hak, kewajiban, dan detail biaya pendidikan yang diberlakukan. Akuntabilitas juga terwujud melalui sistem pengawasan serta mekanisme penyelesaian keluhan yang memberi rasa adil kepada siswa.

Meskipun sudah berjalan dengan baik, AICC masih menghadapi tantangan terkait pembiayaan, terutama bagi siswa yang berasal dari keluarga dengan penghasilan rendah. Upaya-upaya seperti diskon biaya, pembayaran bertahap, dan bantuan dari komunitas menunjukkan keseriusan AICC dalam menjaga akses pendidikan bagi semua kalangan. Namun, langkah-langkah lebih lanjut seperti pengembangan beasiswa atau kerja sama dengan organisasi sosial masih perlu ditingkatkan agar prinsip keadilan benar-benar tercapai. Secara keseluruhan, kebijakan yang diterapkan di AICC Victoria menunjukkan bahwa lembaga pendidikan Islam bisa berkembang secara modern sekaligus menjaga nilai-nilai spiritual dan sosial. Profesionalisme, kebukaan, serta perhatian terhadap kesejahteraan siswa menunjukkan bahwa AICC bukan hanya sekadar tempat belajar, tetapi juga wadah untuk membentuk nilai keadilan dan tanggung jawab dalam dunia pendidikan.

REFERENSI

- Annisa. (2022). Problematika Pendidikan Australia. *Adiba: Journal of Education*, 2(3), 421–428. <https://adisampublisher.org/index.php/adiba/article/view/162>
- Annisa Darma Yanti, Muhammad Syaifudin, Agus Tino Mulio, Doni Hendra, & Elly Marlina.

- (2024). Evaluasi Kebijakan Pendidikan: Strategi untuk Meningkatkan Kualitas dan Keadilan dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Journal of Islamic Education El Madani*, 4(1), 47–52. <https://doi.org/10.55438/jiee.v4i1.138>
- Asnawan. (2020). Relevansi Kebijakan dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Agama Islam. 1–9.
- Gunawan, H., Hastuti, P., Januardi, J., Pramika, D., Kurniawan, C., Ashari S, F., Sihalo, S., Arifin, S., & Maram, N. A. (2024). *Kompilasi Sistem Pendidikan Antar Benua*.
- Hayati, V., Iqbal, M., Masthura, N., & Anwar, S. (2025). Ethical standards in arbitration practice in Indonesia: challenges and strengthening of oversight Standar etika dalam praktik arbitrase di Indonesia: tantangan dan penguatan pengawasan. *Jurnal Geuthè: Penelitian Multidisiplin (Multidisciplinary Research)*, 8(1), 1–10. <https://doi.org/10.52626/jg.v>
- Liana Oly Kisanto, Muhammad Dafa Syahrulli, Evaristo Panesa Lonsong, Oswaldus Antonius Karo, & Rizki Putra Pratama. (2025). Studi Komparatif Penerapan Etika Profesi Dalam Akuntansi Di Indonesia Dan Internasional. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi*, 2(3), 01–09. <https://doi.org/10.69714/0tftp9474>
- Maulida Nuzula Firdaus. (2023). Resiprositas Indonesia dan Australia dalam Kerja Sama Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) Periode Tahun 2020-2021. 2(4), 31–41.
- Panjaitan, R. A. (2025). Interdisciplinary Explorations in Research Sudut Pandang Hukum Perlindungan Anak Terhadap Perilaku dan Moral Anak yang Ada Dalam Jenjang. 1, 83–103.
- Rahadiyan, I., & Mentari, N. (2021). Keterbukaan Informasi Sebagai Mitigasi Risiko Peer To Peer Lending (Perbandingan Antara Indonesia Dan Amerika Serikat). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(2), 325–347. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art5>
- RAHARJO, N. D., PUTRA, H. R., MUNADI, M., & SUHARDI, M. (2024). Analisis Sumber Pendapatan Pendidikan Di Sekolah Islam Victoria, Australia (2015–2023). *ACADEMIA: Jurnal Inovasi Riset Akademik*, 4(4), 151–155. <https://doi.org/10.51878/academia.v4i4.3776>
- Taylor, J. L., Allen, T. O., An, B. P., Denecker, C., Edmunds, J. A., Fink, J., Giani, M. S., Hodara, M., Hu, X., Tobolowsky, B. F., & Chen, W. (2022). Research priorities for advancing equitable dual enrollment policy and practice. July, 1–110. https://cherp.utah.edu/_resources/documents/publications/research_priorities_for_advancing_equitable_dual_enrollment_policy_and_practice.pdf
- Thufail, A. A. (2020). Komparasi Kebijakan Australia terhadap Indonesia Masa Partai Buruh dan Liberal. *Kebijakan Australia Terhadap Indonesia*, 5(1), 1–13.
- Winarsih. (2016). Proceeding on International Conference on Economics , Education and Cultural Development of Moslem Society in ASEAN. Internalisasi Nilai-Nilai Karakter Dalam Petuah Sumbang Duo Baleh Bagi Mahasiswi Asal Minangkabau Di Kota Purwokerto Tahun 2016, 1, 44–59.
- Karim, R. A., Karim, H. A., & Purnawarman, A. (2023). Model of strengthening governance of education fees in schools: A case study at SMK Negeri 4 Payakumbuh. *Proceedings of the International Conference on Management in Education (ICMIE)*.
- Muhtadin. (2025). Cost-free policy and the pursuit of quality education: An exploratory study in Islamic secondary education. *Journal of Islamic Education Research*, 6(3), 353–366.
- Nathie, M. (2021). Are Australian Islamic schools elitist? *International Journal of Educational Research Open*, 2, 100039. <https://doi.org/10.1016/j.ijedro.2021.100039>

- Qosyim, R. A., & Zarkasyi, A. (2024). Management of Islamic philanthropy-based education financing in increasing access to free education for orphans children. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*.
- Raharjo, N. K., Putra, H. R., Munadi, M., & Suhardi, M. (2023). Analisis sumber pendapatan pendidikan di sekolah Islam Victoria, Australia (2015–2023). *Academia: Jurnal Inovasi Riset Akademik*.
- Shakeel, M. D. (2018). Islamic schooling in the cultural West: A systematic review of the issues concerning school choice. *Religions*, 9(12), 392. <https://doi.org/10.3390/rel9120392>
- Shaleh, A. R., Mubarak, & Mulyati, S. (2021). The justice of educational costs in the perspective of Islam and moral philosophy. *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*.

Copyright holder:

© Author

First publication right:

Jurnal Manajemen Pendidikan

This article is licensed under:

CC-BY-SA